



MATERI

PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID DPW PKB DKI JAKARTA

TAHUN 2024



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Nomor : 804 /DPW-21/02/III/2025
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam silaturahmi teriring do'a semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), kami menyusun dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai tindak lanjut atas Surat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 141/KIP-OKJ 1/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Laporan Layanan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Khusus Jakarta, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wallahul Muwaffiq Illaa Aqdamith Tharieq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Maret 2025

DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAERAH KHUSUS JAKARTA


H. Mohammad Fauzi
Sekretaris



Selaku Dewan Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tembusan:

- *Arsip*

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Kayu Putih, Pulo Gadung Jakarta Timur Telp : (021) 22474943
email : dpw_jakarta@pkb.or.id - dpwpkbdki@yahoo.co.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

KATA PENGANTAR

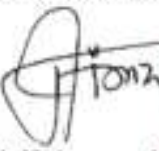
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berkat izin-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPW PKB DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mengacu pada mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Era digitalisasi yang semakin pesat membuka peluang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam konteks ini, peran PPID DPW PKB DKI Jakarta menjadi semakin strategis dalam memastikan penyebaran informasi publik yang valid, khususnya terkait agenda partai, kaderisasi, serta pemberdayaan konstituen.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan layanan di masa mendatang.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAERAH KHUSUS JAKARTA**


H. Mohammad Fauzi
Sekretaris



Selaku Dewan Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



DAFTAR ISI PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DPW PKB JAKARTA TAHUN 2024

Surat Pengantar

Kata Pengantar 2

Bab I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DPW PKB JAKARTA TAHUN 2024 4

A. Peran Strategis Partai Politik dalam Keterbukaan Informasi Publik 4

B. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik 6

1. Kewenangan Ketua PPID DPW PKB Jakarta 7

2. Visi dan Misi PPID DPW PKB Jakarta 8

3. Tugas PPID DPW PKB Jakarta 8

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DPW PKB JAKARTA 10

A. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID DPW PKB DKI Jakarta 10

1. Struktur SDM PPID DPW PKB DKI Jakarta 13

2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 15

B. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 17

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DPW PKB JAKARTA

TAHUN 2024 18

A. Jenis Layanan Informasi Publik 18

B. Alur Layanan Informasi Publik 19

C. Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Tahun 2024 PPID DPW PKB Jakarta 20

D. Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik 21

E. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 22

3

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI DKI JAKARTA



F. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak -----	22
G. Rincian Jenis, Media Respons, dan Kendala Pelayanan Informasi Publik ----	23
H. Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 -----	28

BAB IV

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DPW PKB Jakarta -----	30
A. Kesimpulan -----	30
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut -----	31

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. -----	11
Kondisi Sarana dan Prasarana PPID DPW PKB Jakarta Tahun 2024 -----	
2. Tabel 2 -----	
Struktur PPID DPW PKB DKI Jakarta Tahun 2024 -----	15
3. Tabel 3. -----	
Rincian Tugas dan Kualifikasi SDM PPID DPW PKB DKI Jakarta -----	16
4. Tabel 4 -----	23
Rekapitulasi Publikasi dan Release Media di laman resmi DPW PKB Jakarta (https://pkbjakarta.id/) dan platform media mitra resmi: https://pkbtalk24.com Tahun 2024	



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DPW PKB JAKARTA TAHUN 2024

A. Peran Strategis Partai Politik dalam Keterbukaan Informasi Publik

Kebutuhan akan informasi dan data menjadi aspek krusial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan partai politik. Sebagai mitra sejajar pemerintah di berbagai tingkatan, partai politik memiliki peran strategis dalam proses demokrasi dan pemerintahan.

Dalam menjalankan perannya, partai politik bertanggung jawab atas aktivitas dan fungsinya sebagai wadah kaderisasi serta tempat lahirnya para pemimpin bangsa. Visi, misi, serta garis perjuangan partai, beserta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Setiap kebijakan dan langkah politik yang diambil, termasuk pandangan serta perjuangan partai dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Baik melalui peran legislatif maupun eksekutif, partai politik perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan sesuai dengan hak publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi.

Kewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk partai politik, harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat akurat, mudah diakses, dan dikelola dengan sistem dokumentasi yang baik.

Sebagai landasan hukum utama dalam keterbukaan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menggarisbawahi kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara

cepat, tepat waktu, dengan biaya yang ringan atau proporsional, serta dalam prosedur yang sederhana. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap harus diperhatikan bahwa terdapat informasi yang bersifat pengecualian, yang pengelolaannya harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Pada saat yang sama, badan publik juga memiliki kewajiban untuk memenuhi standar sistem dokumentasi dan pelayanan informasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung keterbukaan informasi di tingkat daerah, DPW PKB Jakarta berupaya memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, DPW PKB Jakarta terus berinovasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini dilakukan agar pelayanan informasi semakin transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi kebijakan ini juga merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, yang menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan DPW PKB Jakarta.

Keberhasilan keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada efektivitas regulasi dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengimplementasikan berbagai regulasi terkait secara optimal. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi adalah memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), terutama dalam lingkungan partai politik seperti DPW PKB Jakarta.



Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPID DPW PKB Jakarta menjadikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 sebagai pedoman utama. Standar tersebut digunakan dalam penyediaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi publik guna memastikan keterbukaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPW PKB DKI Jakarta terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat dan responsif, didukung oleh berbagai informasi publik, termasuk peran pengawasan legislatif Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD DKI Jakarta. Kehadiran DPW PKB Jakarta sebagai representasi politik di tingkat pemerintah daerah semakin diperkuat melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Selain menyediakan layanan informasi secara langsung (offline) selama jam kerja di tahun 2024 dengan tetap mengikuti standar dan protokol kesehatan, DPW PKB Jakarta juga mengoptimalkan layanan berbasis digital. Melalui situs resmi www.pkbjakarta.id, yang terintegrasi dengan berbagai platform media sosial, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat.

B. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan ketentuan Bab V Bagian Kesatu tentang Struktur Kelembagaan PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024, diperlukan pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). DPW PKB DKI Jakarta, sebagai bagian dari badan publik, turut berkewajiban membentuk struktur PPID guna meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari tugas dan fungsinya, Ketua PPID DPW PKB Jakarta memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengarah PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah PPID.
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik serta pendokumentasiannya.
4. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi, dan Bidang Arsip.
5. Membantu Dewan Pengarah PPID dalam melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik.
6. Membantu dalam pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
7. Menjamin ketersediaan dan percepatan layanan informasi publik agar mudah diakses oleh masyarakat.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi publik kepada Dewan Pengarah PPID.

1. Kewenangan Ketua PPID DPW PKB Jakarta

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Ketua PPID DPW PKB Jakarta memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Layanan Informasi, serta Bidang Dokumentasi dan Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Meminta klarifikasi kepada petugas dari Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Layanan Informasi, dan Bidang Dokumentasi dan Arsip dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
3. Menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan.
4. Menugaskan petugas dari Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Layanan Informasi, dan Bidang Dokumentasi dan Arsip dalam:

- Penyiapan dokumen untuk membantu Dewan Pengarah PPID dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.
- Penyusunan pertimbangan tertulis terkait informasi publik yang dikecualikan.
- Penolakan atas permintaan informasi publik yang tidak dapat diberikan sesuai ketentuan.

2. Visi dan Misi PPID DPW PKB Jakarta

Visi:

"Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Misi:

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar, dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan serta layanan informasi yang efisien.
- Meningkatkan serta mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi di DPW PKB DKI Jakarta melalui proses yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

3. Tugas PPID DPW PKB Jakarta

Berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta Nomor 801/DPW-21/01/III/2025 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPW PKB DKI Jakarta, PPID memiliki tugas sebagai berikut:

- Memberikan layanan informasi kepada publik.
- Membuat, menyimpan, menyediakan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugasnya.

- Melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik.
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- Menyediakan informasi serta dokumentasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik.
- Melakukan inventarisasi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan terkait pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, memberikan layanan informasi serta menjamin keterbukaan informasi kepada publik, Pejabat PPID DPW PKB DKI Jakarta terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akses layanan informasi yang transparan dan terbuka bagi masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi publik dalam memperoleh informasi yang valid.

PPID DPW PKB DKI Jakarta juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat dan responsif, dengan didukung oleh berbagai sumber informasi publik. Termasuk di dalamnya adalah informasi mengenai tugas serta fungsi kerja kepartaian dalam mendorong fungsi-fungsi kedewanan Fraksi PKB (FPKB) DPRD DKI Jakarta, agar dapat berjalan sesuai dengan peran dan kedudukannya.

Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, PPID DPW PKB DKI Jakarta mengoptimalkan layanan berbasis digital yang terintegrasi melalui website resmi (www.pkbjakarta.id) serta berbagai platform media sosial yang dikelola, guna memastikan keterbukaan informasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DPW PKB JAKARTA

A. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID DPW PKB DKI Jakarta

Sebagai PPID Pembantu Provinsi DKI Jakarta, PPID DPW PKB DKI Jakarta telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

Fasilitas yang tersedia bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi serta kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satu fasilitas utama yang disediakan adalah:

2. Ruang Layanan PPID DPW PKB DKI Jakarta, yaitu ruang kerja khusus untuk layanan informasi yang berfungsi mempermudah pemohon dalam menyampaikan permintaan data atau informasi publik.
3. Ruang ini mendukung transparansi informasi terkait peran dan fungsi PKB DKI Jakarta sebagai wadah aspirasi politik warga Jakarta, serta sebagai lembaga politik yang mencetak calon pemimpin bangsa, baik di ranah legislatif maupun eksekutif.

Tabel. 1

Kondisi Sarana dan Prasarana PPID DPW PKB Jakarta Tahun 2024

No.	Nama Barang	Satuan	Ket. Kondisi
1.	Kursi Tamu	5 buah	Baik
2.	Meja Layanan Informasi	5 buah	Baik
3.	Meja dan Kursi Petugas Layanan Informasi	5 buah	Baik
4.	Laptop	2 buah	Baik
5.	Komputer	2 unit	Baik

6.	Printer	1 unit	Baik
7.	Kamera	2 Unit	Baik
8.	Tripod	2 Unit	Baik
9.	Lemari Arsip	2 Unit	Baik
10.	Layanan TV Digital	1 Unit	

Selain itu, PPID DPW PKB DKI Jakarta juga menyediakan sajian visual dan layanan infografis melalui media sosial dan kanal YouTube "PKB Jakarta TV" sebagai bagian integral dari pengelolaan informasi publik di lingkungan PPID DPW PKB DKI Jakarta.

Berdasarkan data inventarisasi yang tertuang dalam Tabel I, serta informasi terkait layanan infografis yang disediakan melalui media sosial dan kanal YouTube "PKB Jakarta TV", dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai untuk mendukung optimalisasi layanan informasi publik di PPID DPW PKB DKI Jakarta.

4. Secara langsung (offline) dengan mengunjungi Meja Layanan Informasi atau Ruang PPID DPW PKB DKI Jakarta, yang beralamat di: Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13210. Secara daring (online) melalui:
5. Website resmi: www.pkbjakarta.id/pengumuman/ pada menu "Form Permohonan Informasi Publik". Email resmi:  pkbjakartanews@gmail.com.
Dengan berbagai kanal akses ini, PPID DPW PKB DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang mudah, transparan, dan akuntabel.
6. Website resmi **PPID DPW PKB DKI Jakarta** dapat diakses melalui <https://pkbjakarta.id/>. Pada laman ini, tersedia berbagai layanan informasi publik, di antaranya:



- a). Form Permohonan Informasi Publik
 - b). Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik
 - c). Cek Status Permohonan Informasi Publik
 - d). Cek Status Pengajuan Keberatan
 - e). Berikan Rating atas Layanan Informasi Publik Kami
7. Website resmi **DPW PKB DKI Jakarta** dapat diakses oleh masyarakat melalui <https://pkbjakarta.id/>. Website ini terdiri dari enam sub-menu utama, yaitu:
1. **Beranda**
Menyediakan layanan informasi, infografis, berita terbaru PKB Jakarta, siaran pers, konten media sosial, video, alamat kantor DPW PKB Jakarta, serta materi sosialisasi.
 2. **Profil**
Memuat informasi tentang **PKB DKI Jakarta**, termasuk sejarah berdirinya PKB, naskah deklarasi, *mabda' siasyi*, visi dan misi, asas dan perjuangan PKB, program kerja PKB Jakarta, serta AD/ART PKB.
 3. **Publikasi**
Berisi berita, siaran pers, serta laporan kegiatan PKB Jakarta dan Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta serta daftar anggota DPR RI dan DPRD DKI dari PKB Jakarta.
 4. **PKB Jakarta TV**
Menyajikan berita dan liputan kegiatan PKB Jakarta serta FPKB DPRD Jakarta dalam format audiovisual.
 5. **Struktur**
Memuat informasi mengenai struktur kepengurusan PKB DKI Jakarta.
 6. **PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**
Menampilkan infografis terkait tugas dan wewenang PPID, maklumat PPID, struktur pejabat PPID, serta laporan tahunan pelayanan informasi PPID.

B. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID DPW PKB DKI Jakarta memiliki tim yang bertugas dalam seluruh proses layanan, mulai dari: Pengumpulan data dan bahan informasi, Penyusunan draft jawaban atas permohonan informasi publik, Penyimpanan dan pendokumentasian informasi, Penyediaan dan pelayanan informasi publik, dan Publikasi informasi ke masyarakat.

Seluruh proses tersebut dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) PPID DPW PKB DKI Jakarta, yang bertindak sebagai PPID Pelaksana, sesuai dengan ketentuan dan kualifikasi yang telah ditetapkan.

1. Struktur SDM PPID DPW PKB DKI Jakarta

PPID DPW PKB DKI Jakarta menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPW PKB DKI Jakarta Nomor 801/DPW-21/01/III/2025 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPW PKB DKI Jakarta. Dalam keputusan tersebut, struktur SDM yang menangani layanan informasi publik terdiri dari:

1. Dewan Pengarah PPID
2. Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
4. Bidang Pelayanan Informasi
5. Bidang Dokumentasi dan Arsip

Setiap bidang memiliki tugas spesifik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada publik.

2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam praktiknya, Petugas PPID menangani permohonan informasi publik baik secara langsung (offline) maupun daring (online). Semua permohonan informasi publik ditujukan kepada Dewan Pengarah PPID DPW PKB DKI Jakarta untuk diverifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPW PKB DKI Jakarta Tahun 2024.

Tabel 2.
Struktur PPID DPW PKB DKI Jakarta Tahun 2024

Dewan Pengarah	1. H. Hasbially Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta) 2. H. Muhammad Fauzi (Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta)
Ketua PPID	Ahmad Kholil
Bidang Layanan Informasi	Krismanto
Bidang Pengelolaan Informasi	Nico Pramudya
Bidang Dokumentasi dan Arsip	Danang Putro

Berdasarkan Keputusan Ketua DPW PKB DKI Jakarta Nomor 801/DPW-21/01/III/2025, berikut adalah rincian tugas serta kualifikasi SDM yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPW PKB DKI Jakarta sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan:

Tabel 3.
Rincian Tugas dan Kualifikasi SDM PPID DPW PKB DKI Jakarta

Jabatan dalam PPID	Keterangan Tugas
Pengarah	• Memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam pengelolaan informasi publik. • Mengawasi serta mengevaluasi kinerja PPID dalam memberikan layanan informasi. • Menetapkan kebijakan teknis terkait layanan informasi publik.
Ketua PPID	• Bertanggung jawab atas seluruh operasional layanan informasi publik. • Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis layanan informasi publik. • Mengawasi penyimpanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik. • Memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Bidang Pengelolaan Informasi Publik	• Mengumpulkan, mengelola, dan menyusun informasi publik yang akan disediakan bagi masyarakat. • Melakukan pemutakhiran informasi secara berkala. • Memastikan informasi yang dipublikasikan telah diverifikasi dan akurat.
Bidang Pelayanan Informasi	• Melayani permohonan informasi publik baik secara langsung maupun daring. • Menyediakan layanan konsultasi terkait informasi publik kepada pemohon. • Memastikan respons cepat terhadap permintaan informasi.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	• Menyusun dan mengarsipkan seluruh dokumen informasi publik secara sistematis. • Melakukan klasifikasi informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. • Menyediakan informasi terdokumentasi bagi pemohon sesuai kebutuhan.



C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan informasi publik, PPID DPW PKB DKI Jakarta saat ini belum memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PASK) yang secara khusus mengakomodasi anggaran kegiatan PPID.

Oleh karena itu, pengelolaan anggaran untuk pelayanan informasi publik, termasuk alokasi dana untuk sarana dan prasarana, serta berbagai kegiatan PPID DPW PKB DKI Jakarta sepanjang tahun 2024, dikelola oleh Kepala Sekretariat DPW PKB DKI Jakarta, yang juga bertindak sebagai ex officio dalam pengelolaan informasi.



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DPW PKB JAKARTA TAHUN 2024

A. Jenis Layanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPW PKB DKI Jakarta selama tahun 2024 terus berkomitmen memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, baik melalui layanan langsung maupun tidak langsung.

1. Layanan Langsung

Masyarakat yang ingin mengakses informasi secara langsung dapat datang ke kantor DPW PKB DKI Jakarta pada jam operasional pukul 09.00–15.30 WIB. Layanan ini disediakan melalui pusat data dan informasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Bagi pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara lisan (tidak tertulis), petugas akan membantu proses pengisian formulir, memverifikasi dokumen dan persyaratan yang diperlukan, lalu memberikan bukti registrasi permohonan kepada pemohon secara langsung.

2. Layanan Tidak Langsung

PPID DPW PKB Jakarta juga menyediakan layanan informasi publik secara online melalui situs resmi www.pkbjakarta.id, tepatnya pada sub-menu “Pelayanan Informasi” dalam laman PPID.

Pemohon dapat langsung mengisi formulir permohonan secara mandiri. Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan. Nomor registrasi permohonan akan diberikan, dan jawaban atas permintaan informasi akan dikirimkan ke alamat email yang tercantum dalam formulir.

3. Permohonan Tertulis

Bagi permohonan yang disampaikan melalui surat, faksimile, atau email, petugas PPID akan menghubungi pemohon untuk membantu proses pengisian formulir, memverifikasi dokumen, serta memberikan nomor registrasi sebagai tanda permohonan diterima.

B. Alur Layanan Informasi Publik

PPID DPW PKB DKI Jakarta menerapkan mekanisme yang sistematis dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi, mencakup:

1. Penerimaan Permohonan (langsung, online, atau surat)
2. Verifikasi Dokumen dan Persyaratan
3. Registrasi Permohonan
4. Penyampaian Tanggapan atau Informasi
5. Dokumentasi dan Arsip Permohonan

Komitmen ini merupakan bagian dari upaya DPW PKB DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola partai yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Alur Permohonan Informasi Publik di PPID DPW PKB Jakarta

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pemeriksaan Dokumen

Petugas PPID mencatat, mendaftarkan, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.

3. Proses atau Pemberitahuan

- Jika berkas lengkap, permohonan akan langsung diproses.
- Jika tidak lengkap, pemohon akan menerima pemberitahuan tertulis maksimal **10 hari kerja** sejak permohonan diterima.

4. **Permintaan Kelengkapan Data**

Jika ada kekurangan, PPID akan meminta kelengkapan data melalui surat. Pemohon harus melengkapinya maksimal dalam **3 hari kerja**.

5. **Perpanjangan Waktu (Jika Diperlukan)**

Jika informasi belum tersedia atau belum didokumentasikan, PPID dapat memperpanjang waktu jawaban maksimal **7 hari kerja** dari batas waktu sebelumnya. Perpanjangan hanya bisa dilakukan satu kali.

6. **Penyelesaian atau Keberatan**

- Jika pemohon puas dengan jawaban yang diberikan, proses selesai.
- Jika tidak puas atau tidak mendapat tanggapan, pemohon berhak mengajukan keberatan informasi.

C. Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Tahun 2024 PPID DPW PKB DKI Jakarta

Sebagai bagian dari tugas pelayanan informasi publik, PPID DPW PKB DKI Jakarta secara berkala melakukan rekapitulasi jumlah permintaan informasi yang diajukan masyarakat maupun badan hukum, baik secara langsung (offline) maupun tidak langsung (online).

Sepanjang tahun 2024, tercatat total **70 permohonan informasi publik** dengan rincian sebagai berikut:

- **50 permohonan** diajukan secara **offline**
- **20 permohonan** berasal dari **LSM, media, dan mahasiswa**, juga melalui layanan **offline**

Kategori Informasi yang Diminta

Dari seluruh permohonan tersebut, dapat dirinci:

- **60%** permohonan berkaitan dengan **sikap politik dan garis perjuangan PKB**, khususnya dalam merespons peristiwa politik atau kebijakan pemerintah.

- **40%** permohonan masuk dalam kategori **lain-lain**, mencakup informasi non-media seperti keorganisasian, kegiatan partai, dan dokumentasi internal.

Permintaan dari **media** umumnya membutuhkan klarifikasi langsung dari pengurus DPW PKB Jakarta untuk keperluan pemberitaan atau rilis publik. Sementara itu, permintaan dari **LSM, mahasiswa, dan masyarakat umum** cenderung bersifat administratif, dokumentatif, atau analitis, di luar konteks pemberitaan resmi.

D. Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

PPID DPW PKB DKI Jakarta senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Setiap permohonan informasi yang diajukan—baik secara langsung maupun tidak langsung—memerlukan proses verifikasi dan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2024, PPID DPW PKB Jakarta menerima permohonan informasi melalui berbagai mekanisme, termasuk surat tertulis, email, dan telepon. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan informasi publik adalah **10 (sepuluh) hari kerja**.

Proses tersebut meliputi:

- Verifikasi dan validasi dokumen serta kelengkapan persyaratan;
- Pemberian nomor registrasi permohonan;
- Koordinasi dengan bidang terkait jika informasi belum tersedia;
- Penyusunan dan penyampaian jawaban kepada pemohon;
- Pemberian informasi dan dokumentasi secara resmi;
- Pengarsipan dokumen hasil pelayanan informasi.

Permohonan informasi publik sering kali mencakup lebih dari satu topik atau jenis informasi, sehingga PPID perlu memastikan bahwa setiap jawaban yang diberikan bersifat akurat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Komitmen PPID DPW PKB Jakarta adalah menjaga keterbukaan informasi secara profesional, cepat, dan transparan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.

E. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Sepanjang tahun 2024, PPID DPW PKB Jakarta telah menerima dan mengabulkan seluruh permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat, dengan total sebanyak 70 permohonan.

Dari jumlah tersebut, 70 persen berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan kalangan mahasiswa, sedangkan 30 persen berasal dari individu atau perseorangan.

Seluruh permintaan informasi diproses dan diselesaikan tanpa ada satu pun yang ditolak, termasuk permohonan atas dokumen yang belum sepenuhnya dikuasai atau belum terdokumentasi secara lengkap. Hal ini mencerminkan komitmen PPID DPW PKB Jakarta dalam memberikan layanan informasi secara terbuka, transparan, dan akuntabel kepada publik.

F. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Selama tahun 2024, PPID DPW PKB Jakarta tidak menolak satu pun permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Jumlah permintaan informasi yang ditolak tercatat nol (0).

Hal ini mencerminkan komitmen PPID DPW PKB Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara terbuka dan inklusif, dengan menerima seluruh permohonan informasi publik tanpa diskriminasi, selama memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku.



G. Rincian Jenis, Media Respons, dan Kendala Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi, PPID DPW PKB Jakarta secara aktif menyediakan berbagai bentuk layanan informasi publik. Informasi yang disampaikan meliputi dokumen resmi serta rilis berita online yang dibagikan ke berbagai media—baik media nasional, media lokal, maupun media internal PKB Jakarta.

Untuk media internal, seluruh rilis dan informasi dapat diakses dan diunduh oleh publik melalui laman resmi: <https://pkbjakarta.id>

Sepanjang tahun 2024, PPID DPW PKB Jakarta juga telah mempublikasikan 57 dokumen informasi publik di platform media mitra resmi: <https://pkbtalk24.com>

Dokumen-dokumen ini telah diakses dan dibaca oleh masyarakat sebanyak 17.801 kali sepanjang tahun. Isi dokumen meliputi berbagai laporan resmi, sikap politik PKB Jakarta, serta garis perjuangan partai dalam menghadapi agenda politik besar seperti Pilkada, Pemilu, dan Pilpres 2024.

Rangkuman distribusi dokumen dan jumlah keterbacaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Rekapitulasi Publikasi dan Release Media di laman resmi DPW PKB Jakarta (<https://pkbjakarta.id/>) dan platform media mitra resmi: <https://pkbtalk24.com> Tahun 2024

No.	Tanggal Publikasi	Dokmen Publikasi	Tautan Publikasi
1.	24 Januari 2024	Sikap PKB terhadap Perubahan Iklim. Pesan Ketum PKB terhadap Jajaran Pengurus DPW PKB se-Indonesia	https://pkbtalk24.com/gus-muhaimin-saatnya-melakukan-pertobatan-ekologis-untuk-atasi-problem-lingkungan/
2.	28 Januari 2024	Sekolah Pemimpin Perubahan DPW PKB se-Indonesia	https://pkbjakarta.id/2024/01/gus-muhaimin-tugas-pkb-kembalikan-peran-partai-sebagai-penentu-masa-depan-bangsa/

3.	28 Januari 2024	Kegiatan DPW Perempuan Bangsa Jakarta	https://pkbjakarta.id/2024/01/gelar-muswil-dan-muscab-perempuan-bangsa-dkj-bertekad-jadi-penggerak-perubahan-untuk-masa-depan-jakarta/
4.	29 Januari 2024	Sikap PKB Jakarta terhadap Keterbukaan Informasi E-Monev	https://pkbjakarta.id/2024/01/terima-kunjungan-ki-jakarta-dpw-pkb-jakarta-berikan-atensi-menuju-e-monev-2024/
5	27 Februari 2024	Ketua DPW PKB Jakarta, H. Hasbially Ilyas Masuk 6 besar suara terbanyak calon DPR RI di Dapil 1 Jakarta.	https://pkbtalk24.com/hasbially-ilyas-dari-pkb-masuk-6-besar-suara-terbanyak-caleg-dpr-di-dapil-jakarta-i/
6	27 Februari 2024	Caleg PKB Jakarta, M. Fuadi Luthfi, Bertekad Perjuangkan Perda Pesantren di Jakarta jika terpilih.	https://pkbtalk24.com/m-fuadi-luthfi-caleg-muda-pkb-ini-ingin-perjuangkan-perda-pesantren-di-dki-jakarta/
7.	27 Februari 2024	Sikap PKB Jakarta terhadap Rekap Real Count KPUD Pemilu 2024	https://pkbtalk24.com/amankan-target-kursi-dpr-dprd-pileg-2024-pkb-jakarta-kawal-rekap-real-count-kpud-hingga-tuntas/
8.	5 Maret 2024	PKB Dorong Hak Angket untuk usut kecurangan Pemilu 2024	https://pkbtalk24.com/fpkb-dpr-dorong-hak-angket-untuk-hilangkan-dugaan-kecurangan-pemilu-2024/
9.	6 Maret 2024	Sikap PKB Jakarta dan FPKB DPRD Jakarta terhadap Data Penerima KJP yang bermasalah.	https://pkbtalk24.com/soal-kisruh-data-penerima-kjmu-h-sutikno-jangan-sampai-berdampak-pada-mahasiswa-penerima-manfaat/
10.	6 Maret 2024	Pengumuman PKB Jakarta, H. Triwaluyo dan Hengky Wijaya terpilih jadi Caleg Jadi di Pileg 2024.	https://pkbtalk24.com/h-tri-waluyo-dan-henky-wijaya-jadi-2-caleg-dprd-terpilih-dari-pkb-di-dapil-iii-dki-jakarta/
11.	9 Maret 2024	Pengumuman PKB Jakarta raih 10 kursi DPRD Jakarta di Pileg 2024	https://pkbjakarta.id/2024/03/pkb-raih-10-kursi-ini-daftar-106-caleg-lolos-ke-dprd-dki-jakarta-hasil-rekapitulasi-tingkat-kota-kabupaten/

12.	15 Maret 2025	PKB Jakarta umumkan, usung Hasbiallah Ilyas dan Ida Fauziah maju Pilkada Jakarta 2024.	https://pkbtalk24.com/pkb-promosikan-dua-kandidat-cagub-dki-jakarta-putra-betawi-hasbiallah-ilyas-dan-menaker-ida-fauziyah-ini-profilnya/
13.	26 Maret 2024	Ida Fauziyah, Lolos ke Senayan sebagai DPR RI dari Dapil 2 Jakarta	https://pkbtalk24.com/lolos-dpr-ri-dari-dapil-neraka-jakarta-ii-menaker-ida-apresiasi-masyarakat-di-dapil-pemilihnya/
14.	1 April 2024	Keteria Cagub/Cawagub yang bakal diusung PKB Jakata di Pilgub 2024	https://pkbtalk24.com/ini-kriteria-kandidat-cagub-dkj-yang-bakal-diusung-pkb-di-pilkada-jakarta-2024/
15.	29 April 2024	DPW PKB Jakarta buka Pendaftaran Pilkada 2024, siap usung Calon Potensial.	https://pkbtalk24.com/buka-pendaftaran-pilkada-pkb-jakarta-siap-usung-dan-menangkan-calon-potensial/
16.	17 Mei 2024	PKB Jakarta jalin komunikasi dengan kelompok buruh.	https://pkbtalk24.com/pkb-jakarta-jalin-komunikasi-dengan-ketua-umum-kspji-jumhur-hidayat-untuk-penjajakan-pilkada-2024/
17.	25 Mei 2024	PKB Jakartnya Nyatakan Akar rumput ingin Anies Maju Pilkada 2024	https://pkbtalk24.com/pkb-jakarta-bilang-aspirasi-akar-rumput-inginkan-anies-maju-pilkada-jakarta-2024/
18.	26 Mei 2024	PKB Jakarta nyatakan Media sebagai partner dalam mengawal Pembangunan Jakarta	https://pkbjakarta.id/2024/05/pkb-jakarta-jadikan-media-sebagai-partner-dalam-mengawal-pembangunan-jakarta/
19.	4 Juni 2024	Sikap PKB Jakarta di Pilgub Jakarta, Hampir Dukung Anies Baswedan	https://pkbtalk24.com/diminta-jalin-komunikasi-dengan-anies-pkb-jakarta-bergerak-panaskan-mesin-partai-jelang-pilkada-jakarta/
20.	12 Juni 2024	Sikap PKB Jakarta terhadap pencalonan Anies di Pilkada Jakarta 2024.	https://pkbtalk24.com/sah-pkb-usung-anies-baswedan-sebagai-calon-tunggal-gubernur-jakarta/
21.	13 Juni 2024	Sikap dan Alasan PKB Jakarta soal Rencana Pencalonan Anies	https://pkbtalk24.com/anies-terima-dengan-hormat-pinangan-pkb-untuk-maju-pilkada-jakarta/

		Baswedan di Pilgub Jakarta 2024.	
22.	18 Juli 2024	Sikap PKB Jakarta soal konflik soal dan tawuran di Jakarta.	https://pkbjakarta.id/2024/07/h-hasbiallah-ilyas-lapangan-kerja-bisa-jadi-solusi-atasi-konflik-sosial/
23.	23 Juli 2024	FPKB DPRD Jakarta minta Penerima dana BOS ditertipkan.	https://pkbtalk24.com/diduga-ada-main-mata-h-sutikno-kritisi-penggunaan-dana-bos-yang-tidak-sesuai-aturan/
24..	24 Juli 2024	Sikap DPP PKB soal maraknya Judi Online dan Pinjol yang meresahkan.	https://pkbtalk24.com/hasil-mukernas-pkb-minta-pemerintah-serius-berantas-judol-dan-pinjol-yang-meresahkan/
25.	25 Juli 2024	Sikap PKB Jakarta dan FPKB DPRD Jakarta atas penutupan Monas pada pukul sore/sesuai jam kerja.	https://pkbjakarta.id/2024/01/fpkb-dprd-jakarta-desak-monas-buka-sampai-malam-lagi-biarkan-warga-bisa-menikmati-wisata-monas/
26..	26 Juli 2024	Tasyakuran DPW PKB Jakarta ke-26 Ziarah ke Pendiri PKB dan NU	https://pkbjakarta.id/2024/07/tasyakuran-harlah-ke-26-pkb-jakarta-ziarah-bareng-caleg-terpilih/
27.	27 Juli 2024	Sikap Fraksi PKB DPRD Jakarta terhadap Kebijakan Cleansing Mendadak Guru Honorer di Jakarta	https://pkbjakarta.id/2024/01/h-sutikno-sesalkan-kebijakan-cleansing-mendadak-guru-honorer-di-jakarta/
28.	27 Juli 2024	Sikap PKB Jakarta terhadap pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, belum aman.	https://pkbtalk24.com/hasbiallah-ilyas-nyatakan-anies-belum-aman-pkb-juga-bisa-duetkan-anies-baswedan-fuadi-luthfi/
29.	8 Agustus 2024	Pengumuman DPP PKB gelar Muktamat ke-26 di Bali, 25-26 Agustus 2024	https://pkbjakarta.id/2024/08/pkb-umumkan-gelar-muktamar-di-bali-24-25-agustus-2024/
30.	8 Agustus 2024	PKB Jakarta Laporkan Lukman Edy atas tuduhan pencemaran nama baik.	https://pkbtalk24.com/diduga-fitnah-kader-dan-pengurus-pkb-lukman-edy-dilaporkan-pkb-jakarta-ke-polda-metro-jaya/
31.	15 Agustus 2024	Jelang Muktamar ke-26 di Bali, PKB Jakarta tegaskan	https://pkbtalk24.com/pkb-jakarta-tegaskan-dukung-gus-muhaimin-lanjut-

		dukung Gus Muhaimin kembali Pimpin DPP PKB	pimpin-pkb-di-muktamar-bali-24-25-agustus-2024/
32.	18 Agustus 2024	Perubahan sikap PKB Jakarta di Pilgub 2024, Pilih gabung KIM usung Ridwan Kamil	https://pkbtalk24.com/sekjen-pkb-final-pkb-ikut-gerindra-dukung-ridwan-kamil-di-pilgub-jakarta/
33.	24 Agustus 2024	Pengumuman DPP PKB, Gus Muhaimin kembali terpilih jadi Ketum PKB	https://pkbtalk24.com/gus-muhaimin-kembali-terpilih-jadi-ketum-pkb-periode-2024-2029-di-muktamar-bali/
34.	26 Agustus 2024	Pengumuman 10 Pelantikan Anggota DPRD dari PKB Jakarta	https://pkbjakarta.id/2024/08/sah-10-anggota-dprd-dki-dari-pkb-dilantik-bersama-106-anggota-dprd-jakarta-lainya/
35.	1 September 2024	5 Sikap politik PKB hasil Muktamar ke-26 PKB di Bali	https://pkbtalk24.com/5-poin-isi-deklarasi-independensi-pkb-gus-muhaimin-independen-dari-organisasi-apapun-termasuk-pbnu/
36.	8 September 2024	PKB siap Go Public, menjadi partai bagi semua golongan.	https://pkbtalk24.com/gus-muhaimin-saatnya-pkb-go-public-untuk-semua-golongan/
37.	5 September 2024	SK Pengurus DPP PKB sudah ditekan Menkumham	https://pkbtalk24.com/sk-pengurus-pkb-hasil-muktamar-bali-sudah-ditekan-menkumham-berikut-susunannya/
38.	18 Oktober 2024	PKB dan FPKB DPRD Jakarta Ucapkan selamat atas terpilihnya Pj Gubernur Jakarta, menggantikan Heru Budi Hartono.	https://pkbtalk24.com/fpkb-dprd-jakarta-ucapkan-selamat-atas-pelantikan-pj-gubernur-jakarta-teguh-setyabudi-menggantikan-heru-budi-hartono/
39.	11 November 2024/	PKB Jakarta masih Solid dukung RIDO di Pilgub Jakarta 2024	https://pkbtalk24.com/pkb-jakarta-solid-1000-persen-dukung-ridwan-kamil-menang-pilkada-jakarta/
40.	11 November 2024	PKB Jakarta dan FPKB Jakarta minta madrasah dan Pesantren masuk program sekolah gratis di Jakarta	https://pkbtalk24.com/fpkb-dprd-jakarta-minta-madrasah-dan-pesantren-masuk-program-sekolah-gratis/

41.	22 November 2024	FPKB DPRD Jakarta minta ada Transparansi pengelolaan kantin sekolah negeri di Jakarta.	https://pkbtalk24.com/wakil-ketua-komisi-c-dprd-jakarta-h-sutikno-dorong-transparansi-pengelolaan-kantin-sekolah-negeri/
42.	26 November 2024	PKB Jakarta nyatakan pencegahan korupsi harus diutamakan, sebab kalau nunggu OTT, negara sudah terlanjur rugi.	https://pkbtalk24.com/hasbiallyah-ilyas-saat-ott-negara-sudah-rugi-kalau-bisa-kenapa-tidak-dicegah-sejak-dini/
43.	13 Desember 2024	Tokoh lintas agama dukung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jadi Pahlawan Nasional.	https://pkbtalk24.com/pkb-dan-tokoh-lintas-agama-perjuangkan-gus-dur-jadi-pahlawan-nasional/
44.	18 Desember 2024	FPKB DPRD Jakarta minta Target 100 persen layanan Air Bersih Jakarta tercapai pada 2030	https://pkbtalk24.com/h-sutikno-komisi-c-dprd-jakarta-ingin-pastikan-target-100-persen-layanan-air-bersih-untuk-warga-jakarta-tercapai-di-2030/
45.	23 Desember 2024	FPKB DPRD Jakarta menyatakan dukungan terhadap Gubernur Terpilih Pramono Anung dan Bang Doel.	https://pkbtalk24.com/nyatakan-dukung-pramono-ketua-fpkb-dia-komitmen-realisasikan-usulan-pkb-tentang-perda-pesantren/
46.	27 Desember 2024	FPKB DPRD Jakarta tolak penetapan Dekot se-Jakarta yang tidak Transparan.	https://pkbtalk24.com/dinilai-cacat-prosedur-fpkb-tolak-penetapan-dekot-jakarta/

H. Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tahun 2024, **PPID DPW PKB Jakarta** menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Hingga tahun 2024, PPID DPW PKB Jakarta belum memiliki alokasi anggaran khusus untuk mendukung kebutuhan operasional. Keterbatasan ini mencakup sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan informasi, serta pendanaan untuk berbagai kegiatan yang dirancang guna memperkuat keterbukaan informasi publik.

2. Rendahnya Kesadaran dan Respons Keterbukaan Informasi

Masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan pengurus dan struktur internal PKB Jakarta mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Hal ini berdampak pada minimnya dukungan atau respons terhadap permintaan informasi. Selain itu, sebagian masyarakat dan organisasi kemasyarakatan didapati **memanfaatkan hak atas informasi publik bukan untuk kebutuhan transparansi**, melainkan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan tertentu, yang pada akhirnya dapat mengganggu esensi dari keterbukaan informasi itu sendiri.



BAB IV

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DPW PKB Jakarta

A. KESIMPULAN

PPID DPW PKB Jakarta Komitmen dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, PPID DPW PKB Jakarta terus menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2024, PPID telah aktif mengelola dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala. Selain itu, PPID juga melakukan penginputan data ke dalam sistem informasi yang telah disediakan oleh struktur internal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum pelaksanaan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024.

Berdasarkan laporan kinerja PPID DPW PKB Jakarta selama tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi dan pelayanan publik sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

Ke depan, PPID DPW PKB Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, termasuk memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses secara mudah, cepat, dan transparan.

Dengan upaya ini, PPID DPW PKB Jakarta berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (open government) dan tata kelola yang baik (good governance), sebagaimana menjadi semangat utama dalam keterbukaan informasi publik.

B. REKOMENDASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sepanjang tahun 2024, PPID DPW PKB Jakarta telah menjalankan berbagai upaya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Namun demikian, PPID belum berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang *Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024* yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini menjadi catatan penting sekaligus dorongan agar ke depan, PPID DPW PKB Jakarta dapat lebih aktif meningkatkan kualitas layanan informasi dan berpartisipasi secara optimal dalam kompetisi keterbukaan informasi publik tersebut.

Berdasarkan pengalaman dan pelaksanaan pelayanan informasi selama tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Dibutuhkan pelaksanaan kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Workshop, dan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tugas pokok dan fungsi PPID, serta memperkuat mekanisme layanan informasi dan dokumentasi publik.

2. Sosialisasi Internal dan Eksternal

Perlu ada upaya yang lebih masif untuk menyosialisasikan sistem dan prosedur layanan informasi, baik ke internal pengurus PKB maupun ke masyarakat luas, agar lebih memahami hak dan mekanisme permintaan informasi publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PPID DPW PKB Jakarta bisa terus berkembang menjadi badan publik yang informatif, transparan, dan profesional dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
